



MENCARI FORMAT JURNALISME PUBLIK DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS PROJECT MULTATULI)

Nasrullah Kusadjibrata*, Ardan Achmad, Retno Intani ZA, Kevino Dwi Velrahga

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 10, 2023
Revised June 24, 2023
Accepted July 03, 2023
Available online July 24, 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the editorial management run by Multatuli Project online media and to know the role of online media editorial management of Multatuli Project in realizing public journalism. This research uses a constructivist paradigm with a descriptive case study approach. The methods used are (1) interview, (2) observation, (3) documentation. The research object is Multatuli Project online media with the focus of the research being the editorial management of Multatuli Project. This research found two findings. First, the public journalism built by the Multatuli Project is a commitment to those who are marginalized and to keep their distance from the oligarchs. Second, editorial management, which among other things, at the editorial meeting level provides opportunities for the public who are not part of the editorial team to participate in editorial meetings.

Keywords:

public journalism; Multatuli Project; editorial management

1. PENDAHULUAN

Wartawan sering terjebak pada *bad news is good news syndrome*. Berita cenderung bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) dengan mengutip berbagai pernyataan pejabat pemerintah atau swasta. Sehingga *agenda setting* media yang tercipta lebih bersifat elitis alias dibuat oleh segelintir orang kuat. Tidak ada ruang yang cukup bagi warga masyarakat untuk menjadi narasumber dan mengemukakan agenda mereka sendiri.

Dewasa ini media online juga berkembang kian pesat, namun tidak beriringan dengan kualitas produk di dalamnya. Kebanyakan media online memiliki konsep penyajian berita yang ringkas dan mengandalkan banyak klik sehingga berita tidak terbit langsung secara utuh. Selain itu, topik yang diangkat pun berputar di situ-situ saja bahkan agar tidak kalah saing dengan media lainnya, tiap media berlomba-lomba membuat berita yang dapat menghebohkan publik demi meraih atensi.

Media sebagai lembaga sosial dan penyangga demokrasi keempat, seharusnya mengemban tugas untuk mengontrol perilaku pihak yang berkuasa dan menyuarakan suara masyarakat yang tertindas. Namun nyatanya, isi media dan realitas yang ditampilkan semakin jauh dari kepentingan masyarakat.

*Corresponding author.

E-mail: nasrul@dsn.moestopo.ac.id (First Author)

Di tengah persoalan tersebut, sebuah media online bernama Project Multatuli pun hadir. Datang membawa gaya dan idealisme berbeda di mana ingin mewujudkan sebuah gerakan bernama jurnalisme public.

Project Multatuli adalah sebuah inisiatif jurnalisme yang ingin melayani publik dengan mengangkat suara-suara yang dipinggirkan, komunitas-komunitas yang diabaikan, dan isu-isu mendasar yang disisihkan. Media online yang diluncurkan pada 21 Mei 2021 ini merupakan jurnalisme *nonprofit* di mana menyajikan laporan mendalam berbasis riset dan data, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kerja-kerjanya menekankan kolaborasi antarmedia maupun dengan berbagai organisasi yang meyakini nilai-nilai yang sama: demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, keberlanjutan bumi, dan kesetaraan hak.

Nama Project Multatuli diambil dari bahasa Latin yang artinya: “Saya banyak menderita”. Multatuli dikenal pula sebagai nama pena Eduard Douwes Dekker, penulis buku Max Havelaar. Multatuli dipilih sebagai nama sebuah media dikarenakan media ini ingin memperjuangkan semangat yang sama yakni fokus memberi suara pada mereka yang sudah banyak menderita, di antaranya kaum miskin kota dan desa, korban diskriminasi seks dan gender, dan masyarakat adat, serta membongkar ketidakadilan sistematis yang belum banyak berubah sejak zaman kolonial.

KONSEP JURNALISME PUBLIK

Konsep jurnalisme publik (*civic journalism*) dikembangkan dan dipopulerkan pertama kali oleh Jay Rosen di Amerika Serikat pada era 1990-an. Rosen gelisah melihat kinerja jurnalistik media Amerika yang sama sekali terlepas dari masyarakatnya. Seakan-akan terdapat jarak antara apa yang ditampilkan wartawan dengan apa yang diinginkan warga masyarakat. Realitas yang ditampilkan media nampaknya terpisah dari realitas sosial masyarakat. Berangkat dari kenyataan ini, Rosen berusaha mempertemukan kedua realitas tersebut dengan mencoba menyuguhkan pemberitaan sedemikian rupa sehingga mampu mendorong warga masyarakat untuk ikut terlibat, peduli terhadap permasalahan mereka serta berupaya menyelesaikan masalah menurut cara mereka sendiri. Konsep inilah yang kemudian disebut jurnalisme publik.

Visi dari konsep ini adalah bahwa media sebagai ruang publik seharusnya menjadi wadah untuk mempersatukan semua warga masyarakat untuk saling berbicara, berdialog membahas permasalahan publik dan mencari solusi terhadap masalah tersebut secara bersama-sama. Dalam praktik jurnalisme publik, wartawan peduli dengan persoalan warga serta ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan itu secara langsung. Jurnalisme publik menjadikan media sebagai “forum diskusi” dengan cara memberikan lebih banyak porsi untuk anggota masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan yang ada. Bukan hanya memberitakan peristiwa atau fenomena dalam sikap yang objektif dan imparial, tapi wartawan juga lebih menyatu dan terlibat dalam membimbing dan mendorong warga untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah yang ada.

Pemberitaan dilakukan tidak hanya berupa berita langsung (*straight news*) atau berita opini (*opinion news*), tapi juga dalam bentuk berita mendalam (*in-depth news*), bahkan jika perlu melaksanakan jurnalisme investigasi (*investigative reporting*).

Jurnalisme publik adalah upaya untuk menjangkau publik secara lebih agresif dalam proses pelaporan, untuk mendengarkan bagaimana warga negara membingkai masalah mereka dan apa yang dilihat warga sebagai solusi untuk masalah itu. Informasi-informasi itu kemudian digunakan untuk memperkaya berita.

Berbeda dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*) yang merujuk pada aktivitas jurnalistik atau produksi dan publikasi berita yang dilakukan warga biasa

(bukan wartawan), jurnalisme publik dilakukan wartawan profesional yang bekerja di sebuah media. Jurnalisme publik dan jurnalisme warga sama-sama menggunakan masyarakat (*citizen, civic*) sebagai objek utama. Namun, dalam jurnalisme publik, masyarakat diposisikan sebagai objek, sedangkan dalam jurnalisme warga, masyarakat tidak hanya berada dalam posisi objek, tetapi juga sebagai subjek (pelaku).

Menurut Bob Franklin dkk. dalam buku *Key Concepts in Journalism Studies* (2004: 214), dalam jurnalisme publik media pers tidak hanya menyiarkan berita kepada khalayak, tetapi juga mendorong khalayak untuk menciptakan debat publik. Titik tolak jurnalisme publik adalah tanggung jawab wartawan untuk mempromosikan komitmen warganegara dan partisipasinya dalam proses demokratisasi. Jurnalisme harus mempromosikan dan membantu menyempurnakan kualitas kehidupan publik. Wartawan/media harus menyiarkan berita yang bertolak dari pandangan warga negara biasa. Mereka tidak menyiarkan berita yang faktanya bersumber dari elit politik atau para penguasa.

Wartawan dalam jurnalisme publik bukan hanya berperan sebagai karyawan perusahaan media pers, namun juga berperan sebagai khalayak (publik), seorang warga negara yang harus memperoleh informasi lengkap tentang kehidupan publik, perkembangan politik, dan suasana sosial kontemporer. Jurnalisme publik memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk berdialog dan berdebat tentang segala hal yang mempengaruhi kehidupannya. Media memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencari solusinya sendiri. Dengan demikian, berita dalam konsep jurnalisme publik berasal dari bawah (*bottom-up*).

Meski demikian, konsep jurnalisme publik menurut A.S.M. Romli (www.remoltea.com) sama sekali tidak berpretensi mengubah konsep jurnalistik tradisional yang berupaya mengedepankan objektivitas, keberimbangan (*balance*), *fairness*, dan akurasi berita. Jurnalisme publik hanya menambahkan satu aspek, yakni *humanizing*; pelibatan warga masyarakat dalam melihat masalah.



Sumber: Jurnal Nomosleca; What is "public" in public journalism?

Pada penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan referensi untuk memberi gambaran implementasi jurnalisme publik di tengah perkembangan jurnalisme warga di era digital. Penelitian pertama berjudul *Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik* yang dilakukan oleh Yenni Yuniati dan Atie Rachmiate yang telah dipublikasikan melalui jurnal *Mimbar* Volume XXII No. 1 Januari – Maret 2006. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang wartawan memiliki kesepakatan terhadap jurnalisme publik dan pemahaman para wartawan tentang jurnalisme publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya indikasi para wartawan tidak berpihak pada publik dalam menjalankan profesinya, namun lebih pada kepentingan pemilik modal atau kepentingan-kepentingan bisnis semata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitiannya. Pada penelitian Yenni dan Atie cenderung menggali informasi tentang pemahaman para wartawan tentang jurnalisme publik sedangkan pada penelitian saat ini lebih pada implementasi jurnalisme publik yang dilakukan oleh wartawan. Persamaannya terletak pada adanya penekanan ideologi yang mendasari profesi wartawan untuk lebih mengutamakan penggalian dan penyebaran informasi untuk didiskusikan dan diperdebatkan oleh publik, demi kepentingan publik.

Penelitian kedua berjudul *Jurnalisme Publik & Jurnalisme Warga serta Perannya Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Dalam Proses Demokrasi* yang diteliti Dodot Sapto Adi dari Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang pada tahun 2016. Penelitian ini menekankan bahwa jurnalisme publik merupakan model jurnalisme yang menyertakan masyarakat sebagai bagian dari informasi. Bahkan paradigmanya menempatkan masyarakat sebagai subjek, melalui usaha jurnalistik yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lokus fungsi demokratisasi pers terletak pada sejauhmana pers telah mampu menjadi sebuah ruang publik (*public sphere*); sebuah ruang yang terbebas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian ini mempunyai banyak kesamaan pada penelitian penulis terutama menyangkut lokus model jurnalisme public. Sedangkan perbedaannya, fokus penelitian Dodot lebih pada demokratisasi pers sementara penelitian yang tengah dilakukan cenderung pada penerapan jurnalisme publik yang dilakukan oleh manajemen redaksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melihat bahwa gerakan jurnalisme publik yang dikelola Project Multatuli berbeda dengan pengelolaan jurnalisme pada umumnya dan mungkin saja menerobos rutinitas pengelolaan media. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengelolaan manajemen redaksi yang dijalankan media online Project Multatuli dan untuk mengetahui peran manajemen redaksi media online Project Multatuli dalam mewujudkan jurnalisme publik.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Paradigma konstruktivis digunakan karena peneliti menganggap dengan menggunakan berbagai metode akan mendapatkan banyak informasi dan data-data yang seobyektif mungkin sesuai yang dibutuhkan untuk mengetahui pengelolaan manajemen redaksi yang dijalankan media online Project Multatuli dan untuk mengetahui peran manajemen redaksi media online Project Multatuli dalam mewujudkan jurnalisme publik.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Kebaruan dalam penelitian ini adalah adanya pemahaman tentang perbedaan jurnalisme publik dan jurnalisme warga maupun praktik jurnalisme pada umumnya.

Adapun pengumpulan data yang dipakai ialah (1) Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi. Penelitian difokuskan pada media online Project Multatuli dengan objek penelitiannya ialah manajemen redaksi Project Multatuli. Kami mewawancarai secara online Mawa Kresna (Redaktur Pelaksana Project Multatuli).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnalisme Publik Project Multatuli

Di mata Project Multatuli, jurnalisme publik merupakan penegasan yang ingin disokong untuk menegaskan perbedaan yang sangat kentara antara Project Multatuli dengan media yang lain. Ide Project Multatuli lahir karena keresahan para founder terhadap media-media yang sudah terkoneksi dengan oligarki. Misalnya, Jakarta Post sudah dikuasai Yudi Wanandi, Trans sudah dikuasai Chairul Tanjung. Semua tidak ada yang bisa lepas dari oligarki. Hary Tanoe punya MNC, Surya Paloh punya Metro Grup. Ternyata ekosistem media itu sudah tidak kondusif.

Banyak juga yang bersinggungan dengan *capital venture* atau pemodal. Ketika media kawin dengan modal, maka yang terjadi adalah seperti sekarang. Andalkan *traffic* sebagai pemasukan, bikin berita yang bombastis, *clickbait*, potensi untuk jadi hoaks itu besar karena balap-balapan, tidak bisa dimengerti faktanya apa yang penting ditulis duluan. Di media sosial ada yang viral, itu yang ditulis. Itu menjadi masalah ketika mereka kawin dengan modal, kawin dengan kekuasaan di mana harus balik modal. Ketika cari untung, perusahaan itu mengesampingkan kualitas. Walaupun masih ada media yang tetap menjaga kualitasnya tapi tetap banyak kompensasi yang harus mereka lakukan.

Yang kedua adalah, sebagai ilustrasi, apakah ketika Surya Paloh punya masalah, Metro TV memberitakan? Sudah dipastikan tidak. Okezone tidak akan memberitakan hal buruk terhadap perusahaan Hary Tanoe. Tirto.id tidak akan memberitakan hal yang buruk tentang owner perusahaan tersebut. Itu jadi masalah. Besar kemungkinan akan mengalami masalah itu ketika menghadapi investor, atau ketika berhadapan dengan investor. Dari situlah akhirnya kemudian diputuskan untuk membuat Project Multatuli sebagai media publik. Itu yang ingin dibangun dengan media publik.

Apa kemudian yang membedakan? Karena ini media punya publik, maka tugas Project Multatuli adalah membangun media yang melayani publik. Seharusnya semua media itu memang melayani publik. Tuannya adalah publik. Akan tetapi sekarang sudah beda; pemodal adalah tuannya media. Project Multatuli ingin mengembalikan marwah media di mana kembali ke publik. Karena kita menghamba kepada publik, menjadi pelayan publik, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana publik juga mau menyokong kerja-kerja project ini. Untuk itu dibuatlah yang namanya membership. Di mana publik bisa berpartisipasi di Project Multatuli dengan sumbangan. Kalau akan mendapat sesuatu yang bagus maka harus berpartisipasi terlibat di sana. Donasi atau jadi member. Itu yang membedakan dengan media lain. Walaupun seharusnya sama-sama melayani publik, tapi media yang menganut jurnalisme publik adalah penegasan bahwa media tersebut sepenuhnya milik publik.

Konsekuensinya, pada rapat redaksi Project Multatuli memberi kesempatan kepada yang bukan bagian dari redaksi untuk ikut rapat redaksi. Bahwa kemudian ada informasi yang bocor, tidak ambil pusing. Project Multatuli pernah beberapa kali

mengalami karena ketika rapat redaksi dijelaskan ke Kawan Project Multatuli lagi liputan apa saja dan disadari potensi kebocorannya itu besar. Itu adalah risiko ketika ingin ada partisipasi publik, ingin lebih terbuka dengan pembaca supaya mereka semakin berkomitmen dengan kerja-kerja Project Multatuli. Bahwa kemudian ide liputan diambil media lain atau sudah diantisipasi oleh orang yang akan ditulis, itu bagian dari risiko dalam membangun jurnalisme publik.

Ekonomi media dan sumber dana

Project Multatuli punya tiga kantong. Kantong yang pertama adalah kantong membership. Kantong kedua adalah jurnalisme grant. Grant itu misalnya ada NGO (Non-Governmental Organization) yang memberi *grant* untuk membuat liputan sesuatu dan Project Multatuli selalu terbuka. Misalnya liputan ini didanai oleh siapa dan bekerja sama dengan mana. Liputan-liputan Project Multatuli selalu tertulis di bawahnya dibiayai siapa. Kantong ketiga adalah kantong bisnisnya Project Multatuli. Project Multatuli punya perusahaan, punya PT yang menangani untuk membuat buku bagi NGO atau pihak-pihak tertentu. Tapi dikerjakan bukan oleh Project Multatuli. Project Multatuli punya perusahaan lain yang mengerjakan itu. Termasuk juga *in tax service* buat liputan bareng dengan NGO dan mereka menanggung segala biaya liputan termasuk juga *management fee* dari mereka.

Isunya apakah jadi didikte sama mereka? Tidak. Misalnya mereka akan bahas soal IKN, turunan *angle*-nya Project Multatuli sendiri yang akan menentukan. Tidak ada istilah revisi seperti agency. Pokoknya Project Multatuli sepakat, deal, mereka jika punya data diberikan ke Project Multatuli untuk bahan tulisan, dibuatkan liputannya, naik terus sudah. Tidak ada menunggu *approval* dari mereka lagi. Kuasa utama tetap pada redaksi. Itu namanya *in tax service*. Sekarang paling besar pemasukan dari *journalism grant*, tapi targetnya Project Multatuli ingin menyeimbangkan 30% itu adalah dari kawan Multatuli, 30% donor/grant, 40% lainnya dari *in tax service* dan bisnisnya Project Multatuli yang memang akhirnya tidak terkait dengan kepentingan bisnis mana pun, oligarki mana pun.

Tidak hanya itu, Jika NGO yang diajak kerja sama itu memang haruslah yang sesuai visi Project Multatuli juga. Project Multatuli baru awal tahun ini membuat program untuk kerja sama dengan NGO. Dari redaksi memberi porsi tidak boleh lebih dari 20-30% konten yang ada di redaksi. Misalnya dalam setahun, seminggu tiga tulisan berarti sebulan 12. Kalau 10 bulan berarti 120 artikel. Setahun berarti 144. Gak boleh lebih dari 30%. Berarti kontennya itu harus di bawah 40-an artikel yang bisa kita jual ke teman-teman NGO. Tidak boleh lebih dari itu.

Untuk tahun ini, di bulan Agustus saja sudah *full*. Jadi dari Agustus sampai akhir tahun tidak menerima lagi. Itu dilakukan supaya redaksi punya kuasa untuk menentukan isu apa yang akan digarap. Redaksi tetap punya ruang lebih besar untuk melayani masyarakat yang dipinggirkan. Project Multatuli tetap punya kesempatan untuk mengawasi kekuasaan dengan sisa yang tadi, yaitu 70% konten bisa Project Multatuli atur. Yang kedua karena tim *newsroom* kecil, Project Multatuli tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan porsi yang sangat banyak. Dua hal itu yang jadi pertimbangan.

Manajemen Redaksi Project Multatuli

Sejak awal, Project Multatuli mendeklarasikan diri sebagai media yang ingin melayani publik. Ingin melayani publik, mengangkat isu-isu komunitas yang terpinggirkan, mengangkat isu-isu mendasar yang selama ini tidak menjadi perhatian media, dan juga fokus untuk bisa mengawasi kekuasaan. Ada dua fokus yang utama, yang

pertama mengawasi kekuasaan, yang kedua memberikan suara kepada komunitas-komunitas terpinggirkan, komunitas marginal, atau kelompok marginal.

Karena sudah fokus pada dua hal itu, maka konsekuensinya adalah “Sepertinya kita tidak perlu menulis tentang makro ekonomi atau tentang mikro ekonomi, atau bahas hubungan internasional.” Hal itu nampaknya mungkin bisa masuk tapi bisa jadi jarang sekali. Hingga saat ini belum pernah ada, misalnya tentang makro ekonomi, mikro ekonomi, hubungan internasional, atau rubrik-rubrik kebanyakan di media. Karena sejak awal fokusnya pada 2 isu itu, mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kelompok yang terpinggirkan. Konsekuensinya ya tentu tidak akan membuat rubrikasi seperti media-media umumnya.

Hal lainnya, Project Multatuli juga *mini newsroom*, sehingga sangat tidak mungkin kalau misalnya membuat seperti itu. Ini adalah pilihan paling ideal ketika akan fokus di dua isu yang ingin Project Multatuli awasi.

Akhirnya Project Multatuli menggunakan dan memilah berdasarkan jenis produk. Produknya reportase. Reportase itu berarti tulisan, teks yang selama ini paling sering muncul di Project Multatuli. Kemudian esai foto. Esai foto sudah lazim. Lalu video. Di artikel itu sebenarnya punya yang namanya serial. Ide membuat serial karena ingin membuat sesuatu yang berkelanjutan. Jadi tidak selesai dalam sekali tulis. Project Multatuli menyadari bahwa masalahnya itu sangat kompleks, struktural, dan tidak bisa hanya menjelaskan sesuatu atau mengaitkan sesuatu dengan satu artikel. Itu ide paling mendasar munculnya serial. Misalnya menulis masyarakat adat. Project Multatuli ingin mengawal isu masyarakat adat. Tidak bisa hanya sekali tulis. Mesti harus bikin banyak karena problemnya kompleks. Nulis soal polisi, misalnya, tidak bisa hanya sekali nulis. Harus dikawal terus isunya. Project Multatuli akhirnya mendedikasikan diri dengan mengawal isu secara mendalam dan intens. Namun demikian intensnya tentu tidak seperti Detik atau Merdeka.com yang intensnya itu per detik dan per jam. Intens dalam artian membuat serial yang berkelanjutan, yang selalu ada dan dicoba untuk tidak tergoda untuk mengangkat isu-isu yang muncul di media sosial pada umumnya. Tapi fokus kepada hal esensial yang menjadi masalah utama.

Bicara masyarakat adat, dimulai ketika pandemi di mana fokus pandemi sama masyarakat adat yang sampai hari ini masih terus merilis tentang bahasan tersebut. Terakhir membahas soal masyarakat adat di Kalimantan yang tergusur pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Itu menjadi salah satu fokus Project Multatuli karena akan selalu ada isu baru. Isu polisi juga sama. Project Multatuli selalu kawal karena ada aja isu soal polisi. Sengaja juga tidak ikut dalam pusaran berita Sambo, karena hanya melihat masalahnya itu cuman satu kasus saja, padahal polisi punya masalah pada sistemnya.

Selain itu, Project Multatuli juga menyediakan rubrik yang namanya ide dan esai. Ide dan esai itu semacam opini di media mainstream. Sebenarnya Project Multatuli juga punya produk media sosial sebagai ujung tombak dan itu tidak bisa dipisahkan dari redaksi. Konten media sosial adalah dari produk redaksi Project Multatuli juga.

Menentukan Pilihan Tema dan Isu

Memang ada beberapa isu yang bukan serial. Biasanya yang non serial itu usulan dari kontributor. Jika isunya menarik, menyangkut kepentingan publik, isunya kelompok marginal biasanya disetujui. Bahkan kalau terkait kekuasaan atau oligarki disetujui dengan *pitching* ide. Semua prosesnya ditentukan di rapat redaksi. Rapat redaksi di Project Multatuli itu ada tiga tahap. Tahap pertama, rapat redaksi yang isinya hanya anggota Project Multatuli. Artinya lima orang dari redaksi dan kawan-kawan media sosial dan karyawan Project Multatuli lainnya. Itu rapat redaksi yang rutin seminggu sekali

setiap hari Senin. Di situ selalu update, dalam dua Minggu ke depan artikel apa aja yang akan tayang di Project Multatuli. Membahas ide-ide, teman-teman lain ada ide liputan apa. Di situ juga mengukur apakah ini jangka panjang atau jangka pendek. Apakah ini bisa dibikin serial atau enggak. Semua itu didiskusikan di rapat redaksi.

Contohnya ide serial *underprivileged* Gen-Z. Tadinya dalam diskusinya itu hanya dilontarkan ide perlunya menyoroti teman-teman Gen-Z yang selalu dicap sebagai tukang nongkrong di kafe. Isunya itu dari isu di media sosial. Itu bukan anak muda yang sesungguhnya. Misalkan main ke jembatan Pasar Rebo, mereka yang nongkrong di pinggir jembatan Pasar Rebo, pacaran di sana atau di jembatan Kalibata. Itu Gen-Z yang sesungguhnya dan kita berpikir untuk angkat ini jadi serial dan jadi sesuatu yang menarik. Masalah mereka butuh ruang publik. Mereka tidak punya ruang publik yang memadai. Mau main ke mall itu minimal modalnya Rp100 ribu dan mereka tidak punya akses, tidak punya duit untuk ke mall. Itu problem menarik yang akhirnya dibahas. Project Multatuli sempat ngobrol juga dengan salah satu peneliti UGM setelah itu disimpulkan, menarik untuk dijadikan suatu serial. Hal itu meng-*capture* kondisi *underprivileged* Gen-Z di berbagai kota di Indonesia. Jadi seperti diskusi di dalam *newsroom* dan di dalam rapat.

Rapat kedua adalah rapat Project Multatuli dengan kontributor. Mawa Kresna mewakili redaksi mengundang teman-teman kontributor untuk rapat minta ide dari mereka. Biasanya setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali. Tergantung kebutuhan. Dari Project Multatuli juga menawarkan, “kami mau bikin serial *underprivileged* Gen-Z, di daerah kalian ada gak? Kalian bisa gak meng-*capture*? Kalau bisa, ayo *propose* ide liputannya ke kita. Ajukan ide liputannya ke kita”. Jadi ketemu dengan kontributor fungsinya itu. Project Multatuli punya kontributor yang bisa *pitching ide* serta kita ajukan ide hasil rapat. Termasuk di sana membicarakan hal-hal administratif dan soal pembayaran segala macam. Tapi paling banyak kita ngomongin ide liputan.

Rapat yang ketiga ialah rapat redaksi dengan Kawan Multatuli. Jadi Project Multatuli punya program membership. Member di Project Multatuli itu adalah orang yang membayar untuk membantu kinerja Project Multatuli dan nanti bisa ikut rapat redaksi bersama. Di sana mereka bisa memberi usulan liputan, mengingatkan ‘apa yang luput di-*capture* oleh Project Multatuli’ dan banyak hal. Itu tiga rapat utama kalau buat redaksi.

Prosesnya mesti melalui usul ide sampai kemudian ditunjuk orang atau orang bersedia berangkat liputan. Usulan dari kontributor dan rapat bersama Kawan Multatuli akan dibawa ke rapat redaksi internal dan ditentukan mana yang layak untuk di-*follow up*. Untuk isu sebenarnya terbuka. Yang terpenting ada faktor kepentingan publiknya. Ada kelompok yang dimarginalkan. Project Multatuli punya kriteria yang sesuai dengan visi misi.

Sebenarnya yang dilakukan Project Multatuli menggali problem utama di masing-masing daerahnya. Misalnya, di masa pandemi itu Project Multatuli melihat ada masyarakat adat yang siap menghadapi pandemi, ada yang tidak. Di Baduy, mereka relatif lebih siap karena sistem ketahanan pangan mereka sudah bagus. Misalnya mereka punya cadangan pangan selama setahun. Di teman-teman komunitas Samin, di Blora, di Pati mereka juga sama. Punya cara, punya stok cadangan pangan yang baik. Di Baduy mereka menutup tempat mereka, sigap dalam menghalau pandemi. Di Boti, NTT, mereka memang sejak awal tidak mendapat perhatian pemerintah tapi mereka punya cara tersendiri untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi. Itu yang tidak pernah dapat pemberitaannya di media umum.

Tapi, ada masyarakat adat lain yang tidak seberuntung mereka, misalnya di Jambi ada orang rimba. Orang rimba ketika pandemi mereka sangat bergantung sama pemerintah. Karena ketika pandemi mereka takut aktivitas di luar hutan akhirnya mereka

masuk ke hutan. Problemnya adalah ketika mereka balik ke hutan, hutan mereka sudah hilang jadi sawit. Mereka kehilangan sumber pangan alami yang selama ini mereka dapatkan. Biasanya mereka berburu, dapat dari tanaman, umbi-umbian dan tanaman liar yang itu mereka nggak bisa dapatkan kembali. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan supaya bisa tetap makan ialah mengakses bantuan dari pemerintah yang turunnya tiga bulan sekali, itu pun tidak seberapa. Mereka hanya makan nasi.

Hal itu sangat beda tantangannya. Ketika menentukan *angle* tentu akan cari tahu dulu problem-nya. Di isu lain juga sama, isu *Underprivileged* Gen-Z itu juga sama. Di Jakarta membicarakan orang miskin, putus sekolah, dan jadi anak jalanan. Sementara di Jawa Barat meng-*capture* isu soal nikah muda, punya anak, kerjanya serabutan, dan hutang sana-sini. Di Jawa Barat problemnya nikah muda, di Jakarta pekerja anak, putus sekolah, dan jadi anak jalanan. Di Yogya problem-nya Gen-Z beda lagi, problem-nya itu UMR (Upah Minimum Regional) rendah. Jadi Project Multatuli melihat di setiap daerah itu punya karakter problem yang masing-masing hanya bisa dijawab oleh teman-teman yang di daerahnya, yang tahu dengan kondisinya sendiri. Itu merupakan pendekatan berbeda yang digunakan Project Multatuli untuk melihat masalah. Di banyak serialnya juga sama, masyarakat adat juga begitu prosesnya.

Gaya Penulisan Laporan

Project Multatuli tidak mempunyai gaya penulisan tertentu dan tidak menentukan gaya penulisan harus seperti apa. Mungkin karena pengaruh editor-nya. Pemrednya terutama Fahri Salam. Dia di Yayasan Pantau fokus dengan jurnalisme sastrawi, jurnalisme narasi. Termasuk Mawa Kresna yang belajar dengan Fahri Salam sejak dari Tirto.id akhirnya gaya itu juga yang dipakai ketika Mawa Kresna memperlakukan tulisan dari kontributor dan reporter.

Tapi ada juga yang kontributornya belum bisa untuk membuat tulisan feature, baru bisa *in depth* saja. Naratif yang *in depth reporting* dan investigatif nampaknya belum mampu. Sebisanya saja dulu karena tingkat kesulitannya berbeda. Sebenarnya itu juga yang jadi tantangan Project Multatuli karena ada ketimpangan *skill* penulis. Itu terasa terutama untuk teman-teman yang di luar Jawa. Itu memang tulisannya sangat berbeda. Rasanya ada kesenjangan. Itu pula yang membuat keinginan untuk mentoring satu-satu supaya minimal menemukan standar yang bagus untuk penulisan. Supaya editor gak pusing juga.

Kemudian diversifikasi produk nampak ada *news game* dan lain-lain. Project Multatuli sebenarnya sejak awal tahun komit ingin membuat satu laporan jurnalisme data sebulan satu. Hanya karena tenaganya tidak ada, jadi belum jalan. Sejauh ini baru membuat tiga laporan jurnalsime data. Sekarang sedang mengerjakan yang keempat, hanya sudah tiga bulanan belum selesai juga. Membuat laporan jurnalisme data yang interaktif. Project Multatuli sudah bikin soal kurir, tentang oligarki batubara, pernah membuat soal menghitung sisa makanan, dan yang terakhir ini akan buat soal rokok. Project Multatuli juga merasa karena berada di industri online yang mengandalkan kemajuan teknologi, akhirnya bisa menggunakan medium gim, medium yang interaktif untuk menunjang liputan-liputan ini

Untuk ketentuan kepada penulis dalam mencari data seperti jumlah nara sumber, waktu, riset, Project Multatuli tidak ada ketentuan harus berapa narasumber atau harus apa. Kalau menulis tentang profil misalnya, narasumbernya cuma satu orang itu saja. Tapi memberikan konteks dengan data dan informasi yang ada konteksnya itu sepertinya jadi bagian yang wajib. Setiap kali menulis itu ada konteksnya. Perihal aturan berapa lama menulis, kalau buat teman-teman reporter yang bekerja di Project Multatuli itu mengukur

berapa tingkat kesulitan liputannya. Rata-rata itu sebulan baru selesai tulisannya. Kalau untuk kontributor dibebaskan. Kontributor tidak diberi deadline. Itu juga jadi problem-nya. Karena Project Multatuli merasa tidak menggaji mereka bulanan, masa akan ngejar-ngejar *deadline* ke mereka. Artinya tidak punya cukup hak untuk menagih tanggung jawab mereka, jadi akhirnya dibebaskan.

Hanya belakangan Project Multatuli memberikan *deadline* tapi bukan karena alasan butuh liputannya, atau mau nagih-nagih mereka, tapi hanya sekadar urusan administratif. Jadi Project Multatuli ketika tiap bulan tutup buku uangnya sudah harus terbayar. Tiap kontributor teken kontrak dengan Project Multatuli. Mereka akan liputan ini, diberi waktu tenggat. Ketika mereka mengerjakan lebih dari sebulan yang pusing itu teman-teman keuangan. Harusnya uang sudah dijatah untuk bulan Juli ternyata laporannya baru terbit September. Jadi keuangan buat September bingung. Masalah teknis administrasi saja agar mempermudah teman-teman keuangan, akhirnya dibilang satu bulan maksimal. meskipun lebih dari satu bulan tulisan belum selesai akan bikin kontrak baru.

Adapun untuk memenuhi target tiga tulisan per minggu, caranya adalah Project Multatuli membuat isu yang banyak dan cari kontributor yang banyak. Misalnya, di bulan ini Redaktur Pelaksana Mawa Kresna setidaknya menangani 5-6 kontributor yang sedang bekerja dengan asumsi sebulan atau dua bulan baru selesai tulisan mereka. Jadi memperbanyak tulisan.

Ada masa juga di mana tiba-tiba mereka menyelesaikan tulisan barengan semua. Itu yang membuat Project Multatuli kasihan juga kepada teman-teman kontributor. Project Multatuli tidak expect mereka bisa selesai cepat, ternyata mereka bisa cepat dan bersamaan semua selesai. Karena Project Multatuli hanya punya slot tiga tulisan per minggu maksimal empat, kalau dipaksakan naik semua tidak mungkin. Akhirnya harus antre. Misalnya ada satu tulisan dari Jambi soal truk-truk batu bara yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Korbannya meninggal ketabrak truk. Tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Sopir truknya atau perusahaannya atau bahkan polisi. Itu naskah sudah sebulan masuk, baru bisa tayang. Bisa dibayangkan, karena tiba-tiba banyak yang kirim, naskah yang sudah jadi saat itu harus ditahan karena ada antrean panjang. Project Multatuli terbuka terhadap mereka, memberi tahu bahwa kadang ada antrean panjang untuk rilis tulisan. *Underprivileged* Gen-Z sedang dikerjakan yang antrea di daerah Pantura. Naskahnya sudah jadi seminggu yang lalu, tapi baru bisa tayang paling sebulan lagi.

Meski demikian kadang-kadang ada fase juga kekurangan naskah tulisan untuk diterbitkan, sehingga terpaksa harus kontak-kontak kontributor untuk *follow up* tulisan mereka. Ada beberapa kontributor yang jadi andalan untuk nulis cepat saat kekurangan konten. Kalau reporter ada Alfian yang kita andalkan untuk gerak cepat. Ada juga strategi-strategi seperti itu. Jadi ada beberapa kontributor yang memang kalau diminta hari ini, dia sore udah *pitching* ide lalu seminggu atau dua minggu kemudian tulisan udah diemail. Mereka cukup membantu kalau tulisan sedang kosong.

Sampai saat ini Project Multatuli memiliki 37 kontributor termasuk kontributor foto dan ilustrator. Ada tiga jenis kontributor, yaitu ilustrator, fotografer, dan penulis atau wartawan. Proses menjadi kontributor lebih karena pertemanan. Jadi melalui relasi. Ada juga yang *pitching* ide, ternyata temannya teman. Intinya kecil lingkarnya. Tapi paling banyak kenalan. Misalnya, Evi Mariani (Pemimpin Umum) dulu di *Jakarta Post*. Dia *handle* kontributor-kontributor *Jakarta Post*. Maka ketika dia mendirikan Project Multatuli juga mengandalkan kontributor-kontributor yang sudah *establish* di seluruh Indonesia untuk nulis juga buat Project Multatuli.

Mawa Kresna aktif di AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Di AJI mawa Kresna kenal dengan banyak jurnalis se-Indonesia yang sudah tahu kualitasnya, tahu *track record*-nya. Itu juga salah satu yang dipakai jaringannya. Fahri Salam (Pemred) dan Mawa Kresna dulu juga aktif di Tirto.id dan sudah terbiasa dengan kontributor-kontributor berbagai daerah. Itu diberdayakan juga relasinya. Selain itu, ada juga yang baru-baru *out of nowhere* tiba-tiba kirim ide bagus dan ketika menulis ternyata juga bagus. Project Multatuli senang karena menemukan penulis baru, masih muda, tulisannya bagus, dan isunya bagus. Jadi ada beberapa orang-orang baru. Ilustrator juga sama dari relasi teman-teman Project Multatuli. Fotografer Ricky Yudhistira adalah salah satu editor foto Project Multatuli. Dia memang aktif fotografi dan melibatkan teman-temannya yang berjejaring di seluruh Indonesia untuk bantu Project Multatuli membuat esai foto.

Untuk pembagian kerja di meja redaksi, untuk level editor biasanya meng-handle berdasarkan serial. Misalnya Redpel Mawa Kresna mengawal serial Gen-Z. Maka hampir seluruh naskah serial soal Gen-Z itu dia yang edit. Reporternya siapa aja yang punya ide. Ronna Nirmala (editor) memang punya *background* liputan di isu bisnis dan ekonomi. Kalau ada isu tersebut, dia lebih paham dan yang *handle*. Misal ada juga isu soal KS (Kekerasan Seksual), Ronna Nirmala yang handle tulisannya. Alasannya karena dia perempuan, lebih bisa *approach* dengan kontributor yang perempuan dan korbannya juga. Kalau Fahri Salam (Pemred) meng-handle isu-isu sesuai kompetensinya. Misalnya isu Papua. Isu Papua itu Mawa Kresna tidak menguasai, Fahri Salam yang paling menguasai. Setiap ada isu Papua, dia yang *handle*. Dia juga yang mengarahkan reporter harus bagaimana buat tulisannya. Kalau isu soal polisi mayoritas Mawa Kresna yang mengerjakan.

Intinya, tidak ada pembagian yang ketat. Kalau misalnya Mawa Kresna sedang tidak bisa, minta tolong Ronna Nirmala yang edit. Misalnya dia nggak paham konteksnya, Mawa Kresna yang mengedit. Tapi kalau kayak liputan Gen-Z kan semua orang bisa memahami konteksnya dengan mudah. Itu bisa dilempar ke Ronna Nirmala, bisa dilempar ke Fahri Salam tergantung kebutuhan saja. Misalnya, pekan depan cuti tapi masih ada tulisan soal Gen-Z, langsung minta tolong Ronna Nirmala untuk edit. Reporter juga sama. Alfian (reporter) yang isunya soal polisi, yang susah-susah. Dinda (reporter) juga susah isunya hanya punya karakter masing-masing. Dinda lebih peka dengan isu yang anak muda. Setiap orang punya keahlian masing-masing dan itu yang dikuatkan. Dinda punya interest isu soal Papua, isu kesenjangan, dan anak muda. Isu-isu soal itu kemudian diberikan ke Dinda karena Project Multatuli ingin membentuk reporter yang bisa mendalami satu isu tapi setidaknya dia juga tahu beberapa isu lain walaupun tidak mendalam. Itu yang ingin dibentuk, itu juga yang jarang di media *mainstream* karena terlalu banyak roling.

Bagaimana cara redaksi memastikan kebenaran data dalam tulisan terutama tulisan dari kontributor yang ada di seluruh Indonesia? Yang perlu dipahami, pertama kali ialah pihak redaksi percaya kepada kontributor yang Project Multatuli tunjuk. Mereka adalah orang yang bisa dipercaya, tidak melakukan *fraud*, tidak melakukan manipulasi data dan informasi. Mereka dipilih sebagai kontributor meski berdasarkan pertemanan, tapi dilihat juga *track record* mereka. Misalnya, ada satu kontributor yang di-*blacklist* karena *copy-paste* tulisan dia yang lama. Hal itu secara etika problematik. Ada juga yang seksis. Ada kode perilaku kalau di Project Multatuli. Setiap kali *sign* kontrak, selalu dikirimkan kode perilaku untuk dibaca dulu sebelum mereka tanda tangan. Yang sudah sering bekerja sama dengan Project Multatuli diperlakukan sama supaya selalu diingat. Itu juga bukan jaminan mereka akan berlaku jujur, tapi sejauh ini Project Multatuli menaruh kepercayaan terhadap *track record* teman-teman yang diajak untuk berkontribusi.

Secara teknis, kalau urusan data diberlakukan *cross check* terutama data-data yang bisa diakses publik. Tapi kalau misalnya perihal wawancara dan diragukan, Project Multatuli minta rekamannya. Untuk isu sensitif, diminta rekaman wawancara dengan narasumber dengan transkripnya. Segala komunikasi dengan narasumber itu kadang diminta kalau memang itu berbahaya isunya. Beberapa waktu lalu Project Multatuli menaikkan isu terkait adanya upaya suap di panti rehabilitasi narkoba yang bekerja sama dengan polisi. Project Multatuli minta semua komunikasi dengan narasumber. Harus dipastikan semuanya benar.

Tapi ada hal-hal yang memang menjadi kesepakatan bersama. Misal, ada narasumber *anonymous*, narasumber yang identitasnya dirahasiakan. Dari redaksi kita akan mempertimbangkan yang boleh tahu identitasnya siapa itu cuma dua orang, yakni reporter dan orang yang edit tulisan. Selebihnya tidak boleh tahu untuk alasan keamanan. Kasus kekerasan seksual contohnya. Tidak tahu siapa korbannya, yang tahu hanya penulis dan Ronna Nirmala yang edit. Reporter, korban, dan editornya yang tahu karena basisnya Project Multatuli percaya terhadap kolega. Termasuk dalam isu polisi juga sama. Yang tahu identitasnya cuman Mawa Kresna, reporter, dan korbannya sendiri. Perlu dipahami bahwa Project Multatuli membangun *trust* tinggi terhadap kolega. Ada bukti-bukti yang perlu ditindaklanjuti tentu dalam situasi tertentu hanya ada situasi di mana kesepakatan bersama harus terjadi.

Sejauh ini apakah artikel Project Multatuli pernah mengalami kesalahan data, penulisan, atau sejenisnya saat artikel sudah terbit? Kalau kesalahan data relatif lebih banyak pada *typo*. Bukan karena faktor disengaja, hanya *human error*. Tetapi kalau misalnya penyebutan data atau dokumen kayaknya belum pernah terjadi. Narasumber komplain nampaknya pernah, tapi bukan substansi besar. Misalnya suatu kasus yang jadi *concern* dari narasumber yang luput untuk dituliskan. Itu tentang kekerasan seksual. Project Multatuli minta maaf secara terbuka. Sisanya paling banyak di masalah *typo*.

Hingga sejauh ini respon pembaca terhadap produk Project Multatuli seperti apa? Project Multatuli belum pernah dicek. Namun demikian, dari teman-teman media sosial yang fokusnya ke pengembangan audiens, kritik itu ada. Yang setuju ada, tapi yang paling penting adalah ketika mereka melakukan sesuatu untuk Project Multatuli, baik jadi member, *nge-like*, *re-share*, itu merupakan bagian dari solidaritas mereka terhadap apa yang ditulis Project Multatuli. Pernah bagian membership bikin survei, kebanyakan alasan mereka mau jadi member itu karena solidaritas bukan karena artikelnya bagus, isunya relevan dengan mereka. Sekitar 91% karena ingin bersolidaritas. Ini menjadi satu bagian yang penting ketika bicara tentang media yang akan mengandalkan dana publik untuk keberlangsungannya.

Project Multatuli sejujurnya tidak berharap mendapat banyak respons dari pembaca, tetapi lebih ingin mendapat respon dari orang yang ditulis. Dari mereka yang punya kekuasaan. Saat lalu misalnya tulisan soal polisi, narkoba, dan panti rehab, berapa lama ditelepon Polda Jabar menanyakan, siapa si Biru? Ini siapa si Jingga? Project Multatuli "ingin follow up" karena tulisan menggunakan nama samaran. Dari pengalaman yang seperti itu malah bisa membuat narasumber diteror, diintimidasi, disuruh minta maaf bahwa keterangannya itu tidak benar. Kalau dari redaksi sikapnya sama, ketika narasumber memutuskan untuk menyamakan identitas, narasumber tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali memang narasumber itu bersedia untuk dibuka identitasnya. Itu respon yang diharapkan. Respon evaluasi buat mereka. Kasus Luwu Timur yang paling besar jadi sorotan. Paling kasusnya tidak diusut kembali dengan cara yang terbuka dan baik walaupun hasilnya tidak menyenangkan tapi paling tidak, sudah diupayakan.

Project Multatuli tidak memikirkan *traffic*, tetapi memikirkan dampak. Dampaknya apa dari hal-hal yang sepele tersebut. Yang paling banyak terlihat adalah solidaritas dari pembaca. Misalnya, terakhir nulis soal *Underprivileged* Gen-Z di Yogyakarta. Karena miskin tidak bisa beli jaket Uni Qlo, ada dua orang yang ingin belikan si Hayu (nama samaran) jaket Uni Qlo. Tetapi pembeliannya bukan lewat Project Multatuli. Mawa Kresna langsung memberi kontak penulisnya di Yogya. Silakan dikontak karena komitmen Project Multatuli untuk melindungi identitas si Hayu. Sampai ada yang ingin bayar hutang gadaian sepeda motor.

Kasus lain kayak di Jombang tentang pemerkosaan, ada dana terkumpul sekitar 60 juta tapi bukanlah lewat Project Multatuli. Orang ingin bersolidaritas terhadap korban tapi tidak tahu gimana caranya. Project Multatuli hanya kontak keluarga korban atau komunitas yang mendampingi korban, silahkan ditransfer. Itu hal-hal kecil yang diharapkan bisa membangun solidaritas sesama warga. Tapi lebih diharapkan lagi ketika kemudian yang pegang kuasa, pemegang kebijakan melakukan suatu perubahan. Project Multatuli haram mengecek *traffic*.

Menjaga Keamanan Reporter/Penulis

Seandainya ada intimidasi, demi menjaga keamanan reporter ataupun penulis, ada pihak yang tidak senang dengan tulisan, soal keamanan pertama yang dipikirkan ialah reporter dan narasumber. Kalau dari reporter sebenarnya belum pernah ada. Akan ada *training safety journalism* yang digelar di Bali dan Project Multatuli mengirim reporter untuk nanti sharing internal. Soal keamanan digital teman-teman sudah diinfokan, misalnya jika komunikasi yang sensitif memakai aplikasi tertentu, tidak lewat WhatsApp. Lebih memakai Signal atau Wire karena lebih aman komunikasinya. Kalau isu-isu yang sensitif, data-data yang sensitif Project Multatuli punya ProtonMail. Itu yang dilakukan di dunia digital.

Perihal keamanan, Project Multatuli tidak akan ke daerah-daerah konflik. Ini ada liputan di Aceh, satu daerah yang dikuasai militer. Ketika masuk ke sana itu sudah ketahuan, langsung dibatalkan. Terus buat narasumber, yang kemarin ditelepon Polda Jabar itu tadinya narasumber bersikeras. "Kami nggak mau nama disamarkan. Saya mau terang biar semua jelas". Hanya sebelum naskah tersebut tayang, Mawa Kresna konsultasi ke LBH Pers. Mereka menyarankan untuk konfirmasi ulang kepada narasumber, apakah memang benar-benar ingin namanya tertulis jelas. Karena potensi untuk diteror sangat besar. Ketika nama lengkap sudah ada akan sangat mudah menemukan informasi pribadi lainnya. Setelah itu Mawa Kresna mengirim lagi draft tulisannya ke narasumber, pengacara dan reporter. Mereka sepakat untuk pakai nama samaran saja. Semua pakai nama samaran kecuali NGO yang mendampingi. Akhirnya sesuai dugaan awal, ditelepon Polda. Project Multatuli memang konsultasi ke LBH Pers terutama untuk isu-isu sensitif yang menyerang kekuasaan, menyerang polisi terutama, politisi, oligarki bisnis. Project Multatuli akan selalu konsultasi ke LBH Pers memastikan naskah itu aman.

Ketika misalnya ada kejadian Polda akhirnya tahu bahwa narasumber tersebut itu siapa. Salah satu narasumbernya ketahuan Namanya, lalu dikontak langsung polisi. Mungkin polisi tahu dari *track record* kasusnya. Strategi yang Project Multatuli lakukan ialah menaruh di *safe house* bersama teman-teman yang mendampingi dia. Nonaktifkan semua gadget, bawa ke *safe house* dan *safe house*-nya pun tidak tahu dimana. Yang tahu hanya pengacara dia dan yang bersangkutan. Itu kesepakatan Project Multatuli lakukan.

Di kasus Luwu Timur, Project Multatuli mengevakuasi narasumber dan kontributor. Mereka sengaja dibawa ke Makassar semuanya supaya aman. Menulis soal Aceh, kontributor di Aceh takut kalau menggunakan nama dia sendiri. Project Multatuli

punya solusi. Pertama, tidak menggunakan namanya. Kedua, menggunakan namanya tapi sebelum tulisan itu di-*publish* yang bersangkutan harus sudah kabur ke Medan atau ke Jakarta. Untuk konsekuensi keamanan tentu Project Multatuli mem-*back up* soal transportasi, biaya hidup dan penginapan. Project Multatuli bertanggung jawab. Project Multatuli berharap tidak ada hal-hal seperti itu, namun kita selalu memikirkan masalah keselamatan narasumber dan reporter.

Indikator Keberhasilan

Apa yang diupayakan Project Multatuli untuk mengukur dampak keberhasilan, adalah dengan tiga indikator. Indikator pertama republikasi. Project Multatuli itu media yang lisensinya *Creative Common* di mana siapa pun bisa *copy-paste* dari artikel Project Multatuli untuk media lain. Kalau ingin membuat blog sendiri yang isinya sama itu diperbolehkan. Indikator kedua adalah *impact* terhadap apa yang diberitakan. Misalnya muncul simpati publik, donasi, atau segala macamnya itu yang kita harapkan. Dampak ketiga adalah perubahan kebijakan. Misalnya kayak kasus Luwu Timur di mana sampai melakukan investigasi ulang. Di kasus ojek online misalnya, liputan ini dijadikan salah satu bahan rekomendasi perubahan peraturan tentang ojek online oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Itu target perubahan kebijakan. Jadi bukan viral, bukan *traffic*, tapi mengukurnya dengan tiga hal itu.

Apakah artikelnnya sukses? Tentu tidak semua. Project Multatuli sadar tidak semua bisa *driving* isu dengan baik tapi ada beberapa isu itu bisa men-*deliver* dan bisa *leading* dengan baik. Awak Project Multatuli menganggap sukses untuk *campaign* tentang polisi. *Campaign* liputan #PercumaLaporPolisi sekarang jadi menjadi milik publik. Siapa pun bisa pakai tagar tersebut. Ketika ada tren polisi yang buruk, berucap percuma lapor polisi. Itu salah satu keberhasilan Project Multatuli untuk membangun solidaritas publik, membangun kesadaran publik untuk mengawasi kepolisian. Itu salah satu yang tidak pernah menyangka akan terjadi. Tapi ketika terjadi, Project Multatuli tidak pula meributkan bahwa tagar itu harus di HAKI seperti Citayam Fashion Week. Project Multatuli justru merasa ini punya publik sekarang. Hal itu diserahkan ke publik akan diapakan. Project Multatuli tidak akan merasa seperti diambil orang. Justru dipersilakan karena itulah yang diinginkan. Ketika publik sudah merasa memiliki itu, berarti mereka sudah jadi bagian pendukung Project Multatuli.

4. SIMPULAN

Ada dua hal yang bisa disimpulkan dari penelitian “Mencari Format jurnalisme publik di era digital, studi kasus manajemen redaksi jurnalisme publik media online Project Multatuli ini. Pertama, pengertian jurnalisme publik yang dibangun oleh Project Multatuli. Kedua, manajemen redaksi sebagai derivasi dari pengertian jurnalisme publik yang diterjemahkan Project Multatuli dalam tataran praktis dan teknis.

Pertama, sesuai namanya, Multatuli selalu menyuarakan aspirasi mereka yang terpinggirkan. Maka, Projek Multatuli juga menafsirkan jurnalisme publik sebagai varian yang membedakan dengan media lainnya. Ide ini diterjemahkan dengan menjaga jarak, bahkan berhadapan dengan kepentingan oligarki yang sekarang sudah terlalu merangsek ke jalannya roda bisnis media. Kepentingan oligarki bahkan sudah menentukan cara redaksi memilih isu dan kebijakan lebih jauh. Media sejatinya milik publik maka tugas Project Multatuli adalah mengembalikan media yang melayani publik. Tuannya adalah publik. Realitanya saat ini pemodal adalah tuannya media.

Kedua, manajemen redaksi berlandaskan jurnalisme publik serta merta punya konsekuensi yang berbeda dengan media lainnya. Antara lain, di level rapat redaksi memberi kesempatan kepada publik yang bukan bagian dari redaksi untuk ikut rapat redaksi. Rapat redaksi terdiri dari tiga tahap. Usulan dari kontributor dan juga rapat bersama Kawan Multatuli dibawa ke rapat redaksi internal dan ditentukan mana yang layak untuk di-*follow up*. Isu yang diangkat bersifat terbuka, yang terpenting ada faktor kepentingan publiknya dan ada unsur mereka yang dimarjinalkan. Project Multatuli juga memiliki pilihan model ekonomi media yang berbeda, yakni menggunakan tiga kantong dalam memperoleh masukan. Pertama kantong membership, kedua adalah *jurnalisme grant*, dan ketiga adalah kantong bisnis Project Multatuli.

5. REFERENSI

Buku

- Sudarsono, Achmad Boediman. (2015). *Jurnalisme Online: Pengantar Aplikasi Bisnis Media Online*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.
- Burton, Graeme. (2008). *Yang Tersembunyi Di Balik Media, Pengantar Kepada Kajian Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Creswell, John W, Research Design. (2013). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ketiga*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. (2005). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Foust, James C. (2005). *Online Journalism: principles and practices of news for the web*. Scottdade: Holcomb Hathaway.
- Ishadi, S.K. (2014). *Media dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas
- Muda, Deddy Iskandar. (2003). *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional*. Bandung: Rosdakarya.
- Asep Syamsul M. Romli. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Henny dan Rumondor, Alexander. (2004). *Manajemen Media Massa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subiakto, Henry dan Rahmah, Ida. (2012). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yin, Robert K. (2014). *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Skripsi

- Adi, Dodot Sapto. (2016). *Jurnalisme Publik & Jurnalisme Warga serta Perannya dalam Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Proses Demokrasi*. Jurnal Nomosleca Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur.
- Febriani, Ina Salmah. (2010). *Analisis Deskriptif Manajemen Redaksi pada Republika Online*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zulva, Nizza Nurmalia. (2018). *Jurnalisme Presisi pada Media Online (Studi Kasus Manajemen Redaksional Tirto.id ditinjau dari Jurnalisme Presisi)*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Makalah dan Artikel

Sudiby, Agus. *Tabloidisasi Pemberitaan Media*. Kompas, 8 Februari 2022.

Situs web

<https://projectmultatuli.org/> <http://www.ec.ubi.pt/ec/09/pdf/EC09-2011Mai-07.pdf>